

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada perkembangan tata kelola Keuangan Negara sangat dirasakan semakin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam mengelola Sumber Daya Keuangan Pemerintah. Dalam fungsi Perbendaharaan tersebut meliputi, perencanaan kas yang baik, pencegahan kemungkinan terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan, pencairan sumber pembiayaan dan pemanfaatan dana yang menganggur untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan. Dalam penjelasan atas UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang “Keuangan Negara disebutkan bahwa UU Nomor 17 Tahun 2003 tersebut disusun dalam upaya menghilangkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Negara dan mewujudkan sistem pengelolaan *fiscal* yang berkelanjutan”. Untuk mencapai tujuan itu maka Kementerian Keuangan melakukan upaya-upaya melalui reformasi tata kelola keuangan yang berorientasi pada transparansi dan akuntabel. Yang mana sesuai dengan “Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, tata kelola keuangan mencakup penerimaan Negara dan pengeluaran Negara (Ratmono, 2015)”.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah melakukan penataan organisasi keuangan sesuai kebutuhan masyarakat, perkembangan kebijakan keuangan Negara, dan dinamika administrasi publik. Pembenahan dan pembangunan kelembagaan yang terarah dan pro publik diharapkan memberikan dukungan dan pedoman bagi masyarakat dan Negara yang lebih adil dan rasional. Kementerian Keuangan telah membentuk penataan

organisasi keuangan sejak tahun 2002 dan terus berjalan hingga saat ini. Penataan organisasi keuangan tersebut meliputi pemisahan, penggabungan dan penajaman fungsi, serta modernisasi penajaman tugas dan fungsi yang dilakukan kepada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Badan Kebijakan Fiskal. Sementara modernisasi diimplementasikan dalam pembentukan Kantor Pelayanan pajak ( KPP ) Modern Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Utama (KPU DJBC) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Percontohan. Diadakannya pemisahan dan penajaman fungsi organisasi diharapkan mampu menciptakan struktur organisasi yang menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia sejak adanya Undang-Undang Keuangan Negara pada tahun 2003, terjadi pada saat dunia sedang mengalami transformasi menuju era masyarakat informasi. Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi Vol. 17 No. 1 April 2017 “Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat dengan potensi pemanfaatannya yang sangat luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat”. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan Reformasi Manajemen Keuangan Negara (*Government Financial Management Reform*), langkah awal adalah dengan melakukan kerja sama dengan Bank Dunia melalui program *Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAP)*.

Tujuan program GFMRAP adalah untuk memperkuat efisiensi dan integritas dalam manajemen keuangan publik dan administrasi pendapatan, terutama melalui penguatan tatakelola, akuntabilitas dan transparansi.

“Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) adalah sebuah sistem yang dibangun oleh Kementerian Keuangan dengan bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara”. Dalam perihal ini juga dilaksanakan untuk memenuhi tuntutan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. “SPAN merupakan sub-program dari program reformasi keuangan publik terbesar dalam sejarah di Indonesia yakni *Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAP)*”. Untuk Reformasi Sistem Manajemen Keuangan dalam konteks penerapan IFMIS (*Integrated Financial Management Information System*) yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Negara yang Terintegrasi, sehingga pengembangan SPAN merupakan langkah awal menuju implementasi IFMIS, pada tahap awal difokuskan pada reformasi Penganggaran dan Perbendaharaan Negara (*Budget and Treasury Modernization*), kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dari sisi persiapan anggaran (*Budget Preparation*) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dari sisi pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban akuntansi (*Budget Execution and Responsibility Accounting*).

Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) pada SPAN dapat memberikan dukungan pelayanan administrasi, serta untuk membantu pengambilan keputusan. Menurut Baig dan Gururajan (2011), “teknologi informasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan bisnis”. Dalam hal ini “akuntansi sebagai bisnis, sistem bahasa dan informasi, harus menyesuaikan diri dengan teknologi baru yang akan disampaikan kepada pengguna laporan keuangan (Sarokolaei et al, 2012)”. Menurut Ismail dan Malcolm (2007), “bahwa sebuah perusahaan yang memiliki kecanggihan teknologi mempunyai tingkat keselarasan Sistem Informasi Akuntansi yang baik dibandingkan dengan yang tidak menggunakan”. Menurut Kusumastuti dan Irwandi (2012), “pada perkembangan sistem informasi para pemakai menjadi fokus penting berkaitan dengan keefektifan sistem informasi akuntansi”. Perubahan yang terjadi dalam pengelolaan Keuangan Negara berdampak terhadap proses adaptasi Satuan Kerja (Satker), Kementerian/Lembaga (K/L) dan para pengelola keuangan, baik ditingkat Satker dan K/L itu sendiri. Munculnya berbagai peraturan yang baru terkait beberapa hal mengenai prosedur, aturan, dan sistem menyebabkan timbulnya perubahan yang harus diikuti. Perubahan yang secara cepat atau lambat, membuat seluruh pihak yang terlibat tetap harus dapat mengikutinya. Salah satu perubahan besar diakhir bergantinya sistem lama kepada SPAN yaitu terbitnya peraturan terkait pembaruan prosedur sistem yang lama. Salah satunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 tahun 2012 tentang “Tata Cara Pembayaran APBN yang sudah menggunakan konversi dari sistem lama ke SPAN”. Pada sisi lain, SDM di tiap satker memiliki kompetensi yang berbeda-beda sehingga menimbulkan banyak permasalahan dalam implementasi proses pencairan dana. Permasalahan yang timbul menyebabkan Satker harus



datang lebih dari sekali dalam proses pencairan dana. Hal ini disebabkan karena kurangnya dokumen yang harus dilampirkan tiap mengajukan pencairan dana, kesalahan *input* dalam pembebanan.

Sementara, pada pembangunan dan implementasi SPAN merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Negara dan melakukan modernisasi pengelolaan Keuangan Negara yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja. Dalam penerapannya, SPAN yang sudah mulai diimplementasikan ternyata memiliki keterbatasan bagi para penggunanya. Salah satunya adalah adanya keterbatasan bagi pengguna untuk dapat melakukan akses ke sistem guna melakukan monitoring serta pengecekan atas informasi transaksi yang telah dilakukan. Hal ini dikarenakan SPAN belum menyediakan keseluruhan modul yang dibutuhkan untuk melakukan monitoring dan menyusun proses *reporting* terkait transaksi Keuangan Negara yang dilakukan. Sehingga dalam sebuah sistem yang besar dan terintegrasi tersebut, pengguna justru tidak memiliki akses untuk mengetahui sudah sejauh mana dokumen transaksi keuangan mereka diproses dalam sistem SPAN.

Keterbatasan dan kebutuhan yang ada tersebut kemudian diakomodir dengan cara membuat aplikasi Online Monitoring SPAN (OM-SPAN). “OM-SPAN merupakan sebuah sistem informasi berbasis web yang terpisah dari SPAN, OM SPAN secara konseptual bekerja dengan cara memindahkan data dari server SPAN ke servernya sendiri sesuai kebutuhan”. Pemindahan data yang dilakukan bersifat *incremental* sesuai dengan *batch* dalam setiap jam maupun *batch* yang ada pada penutupan hari kerja.

Dengan adanya OM-SPAN, diharapkan dapat memonitoring dan penyediaan informasi terkait implementasi SPAN pada KPPN dalam wilayah kerjanya, serta meningkatkan efektifitas, efesiensi, akuntabilitas, dan transparansi di dalam pengelolaan Keuangan Negara. Efektifitas dapat diperoleh melalui data yang akurat, sedangkan efesiensi ditujukan agar pengelolaan keuangan negara menjadi akuntabel dan transparan melalui sistem yang terintegrasi dengan baik, dengan begitu dapat terciptanya *good governance*.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengetahui bagaimana cara pengimplementasian sistem informasi OM-SPAN dalam memonitoring serta mengetahui evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga Sumatera Barat pada Direktorat Jendral Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat tersebut sebagai pengaplikasian teori yang telah didapatkan diperkuliahan yang dituangkan dalam sebuah laporan magang dengan mengambil judul **“Penggunaan Sistem Informasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (OM-SPAN) Sebagai Alat Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Pada Direktorat Jenderal Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat.”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana pengimplementasian Sistem Informasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) dalam Memonitoring serta Mengevaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Sumatera Barat pada Direktorat Jenderal Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat?
2. Apa-apa saja kendala-kendala yang dihadapi direktorat jenderal kantor wilayah perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat dalam menggunakan Sistem Informasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) Sebagai Alat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Sumatera Barat?

### **1.3. Tujuan Kegiatan Magang**

Magang adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam kuliah kerja praktek atau magang ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara pengimplementasian Sistem Informasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) dalam memonitoring serta mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga Sumatera Barat pada Direktorat Jenderal Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Direktorat Jenderal Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat dalam menggunakan Sistem Informasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) sebagai

alat monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga Sumatera Barat.

#### **1.4. Manfaat Kegiatan Magang**

Kegiatan magang ini merupakan suatu proses untuk mempelajari praktek-praktek pekerjaan yang nyata pada Instansi sehingga dapat memberikan manfaat:

##### **1. Bagi Instansi**

Hasil Laporan Magang ini diharapkan dapat membantu dan digunakan sebagai pertimbangan pemimpin menggunakan Sistem Informasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) dalam memonitoring serta mengetahui evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga Sumatera Barat.

##### **2. Bagi Akademisi**

Sebagai bahan tambahan untuk pengetahuan, wawasan, dan informasi terkait dengan Sistem Informasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) dalam memonitoring serta mengetahui evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga Sumatera Barat.

#### **1.5. Tempat dan Waktu**

Adapun tempat yang dipilih sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang akan dibahas yaitu pada Direktorat Jenderal Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat sebagai tempat untuk melaksanakan kuliah kerja lapangan/magang selama



40 hari kerja, yang dimulai dari tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan 19 Februari dengan ketentuan jam kerja hari senin sampai jumat pada pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.

## 1.6. Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika yang penulis gunakan dalam penyusunan tugas akhir ini terdiri dari Bab I Pendahuluan. Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu pelaksanaan magang, serta sistematika penulisan.

Bab II Menggambarkan tentang tinjauan pustaka atau segala sesuatu yang akan menjadi landasan teori dalam menyelesaikan laporan magang mengenai penggunaan sistem informasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM-SPAN) sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga Sumatera Barat.

Bab III membahas tentang gambaran umum dari lembaga kegiatan magang yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, yang berisikan tentang sejarah lembaga, visi dan misi lembaga, tugas dan fungsi lembaga, struktur organisasi lembaga, dan uraian tugas unit kerja.

Bab IV merupakan bab yang berisikan pembahasan tentang hasil studi lapangan selama di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat yang menyangkut tentang penggunaan menggunakan sistem informasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM-SPAN) sebagai alat monitoring dan evaluasi

kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga Sumatera Barat. Dalam bab ini penulis juga memaparkan analisis terhadap data dengan teori yang terkait.

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penulis untuk lembaga dan penelitian lainnya yang didasarkan pada data penelitian.

